

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI BUKU

Abdullah, Rozali, 2013, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

Atmosudirjo, S. Prajudi, 1994, *Hukum Adminisrasi Negara*, Jakarta, Ghalia Indonesia.HR, Ridwan, 2011, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Rajawali Pers.

Azhary, Tahir, 1992, *Negara Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang.

Basah, Sjachran, 1989, *Hukum Acara Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Administrasi (HAPLA)*, Jakarta, Rajawali Press.

Hadjon, Philipus M, 2008, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Hamidi, Jazim, 1999, *Penerapan Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Layak (AAUPB) di Lingkungan Peradilan Administrasi Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

Indroharto, 2000, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Pustaka Sinar Harapan.

Kansil, C.S.T dan Christine S.T. Kansil, 2006, *Kitab Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, PT. Anem Kosong Anem.

Marbun, SF, 1988, *Peradilan Tata Usaha Negara*, Yogyakarta, Liberty.

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana.

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Penerbit Universitas Indonesia.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudi, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.

Suhardiadi, Arie Kusumastuti Maria, 2003, *Hukum Yayasan di Indonesia*, Jakarta, PT. Abadi, Jakarta.

Sunggono, Bambang, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, RajaGrafindo Persada.

Syamsudin, M., 2007, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada.

T, Titik Triwulan dan Ismu Gunadi Widodo, 2014, *Hukum Tata Usaha Negara dan Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara Indonesia*, Jakarta, Kencana.

Utrech, E, 1988, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Surabaya, Pustaka Tinta Mas.

Volly, Willy D.S., 2014, *Dasar-dasar Ilmu Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.

Wiyono, R, 2010, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, Sinar Grafika.

Yadiman, 2009, *Eksistensi PTUN dalam Reformasi Birokrasi*, Bandung, AGRO Trading & Publisher.

Zairin Harahap, Zairin, 2002, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.

REFERENSI INTERNET

Asshiddiqie, Jimly, *Gagasan Negara Hukum Indonesia*,
http://www.jimly.com/makalah/namafile/135/Konsep_Negara_Hukum_Indonesia.pdf. Diakses pada tanggal 8 November 2016.

Karlan, Aryo, *Sejarah Peradilan Tata Usaha Negara*, <http://aryokarlan.blogspot.co.id/2009/12/sejarah-peradilan-tata-usaha-negara.html>, di akses pada tanggal 29 April 2016

Simlitabmas, *Pengumuman Daftar Nama Pemenang*,
<http://simlitabmas.dikti.go.id/fileUpload/pengumuman/Daftar%20Nama%20Pemenang%20Penelitian%20Tahun%202016.pdf>, di akses pada tanggal 23 Januari 2017

Universitas Putera Batam, <http://www.upbatam.ac.id/profil.html>. Diakses pada tanggal 27 Desember 2016.

Universitas Putera Batam, http://www.upbatam.ac.id/pendaftaran/7-biaya_pendidikan-tembesi.html, di akses pada tanggal 23 Januari 2017.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Amandemen.

Indonesia, Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara. UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 1986 Nomor 77); Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 35); Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (Lembaran Negara RI Tahun 2009 Nomor 160).

Indonesia, Undang-Undang Yayasan. UU Nomor 16 Tahun 2001 (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 112); Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 Tentang Yayasan (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 113).

Indonesia, Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 20 Tahun 2003. Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78.

Indonesia, Undang-Undang Pemerintahan Daerah, UU Nomor 32 Tahun 2004. Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125.

Indonesia, Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik, UU Nomor 14 Tahun 2008. Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 61.

Indonesia, Undang-Undang Pendidikan Tinggi, UU Nomor 12 Tahun 2012. Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 158.

Indonesia, Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, UU Nomor 30 Tahun 2014.

Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 292.